

Keunggulan Dan Ketangguhan Ideologi Pancasila

Surajiyo

Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Nangka/TB Simatupang No. 58C, Tanjung Barat, Jakarta Selatan

Email: drssurajiyo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ideologi sebenarnya bersumber pada suatu sistem filsafat, dan merupakan pelaksanaan sistem filsafat. Komunisme bersumber pada filsafat materialisme, melahirkan faham atheisme serta faham perjuangan kelas dan diktator proletariat. Pancasila bersumber dari filsafat bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala dalam 'triprakoro' (istilah Notonagoro) yaitu adat-istiadat, kebudayaan, dan religi. Kemudian dengan pemikiran yang mendalam para 'founding fathers' menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah hasil karya bangsa Indonesia sendiri sejajar dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia, bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya.

Metode penelitian ini adalah berdasarkan penelitian pustaka, maka data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang diolah dengan metode reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ideologi Pancasila memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi komunisme, liberalisme dan fascisme. Ideologi Pancasila juga mempunyai ketangguhan bukan hanya karena faktor internal ideologi itu sendiri, yaitu kebulatan dan keutuhannya yang mengagumkan, namun juga karena dukungan faktor eksternal yaitu barisan penjaga ideologi Pancasila, baik yang formal maupun informal.

Kata kunci : Ideologi, Pancasila, komunisme, Liberalisme, Fascisme.

ABSTRACT

Ideology actually comes from a philosophical system, and is the implementation of a philosophical system. Communism originated in the philosophy of materialism, gave birth to atheism and class struggle and the dictatorship of the proletariat. Pancasila originates from the philosophy of the Indonesian nation itself since time immemorial in the 'triprakoro' (Notonagoro term), namely customs, culture, and religion. Then with deep thought the 'founding fathers' made Pancasila the state ideology. Pancasila as the ideology of the Indonesian nation is the work of the Indonesian nation itself, which is parallel to the other major ideologies in the world, it even has advantages over other ideologies.

This research method is based on literature research, so the data collected is qualitative data that is processed by reflective method, equipped with the 'verstehen' method. The results showed that the Pancasila ideology had advantages over the ideology of communism, liberalism and fascism. The Pancasila ideology also has resilience not only because of the internal factors of the ideology itself, namely its amazing unanimity and integrity, but also because of the support of external factors, namely the guardians of the Pancasila ideology, both formal and informal.

Keywords: Ideology, Pancasila, Communism, Liberalism, Fascism

1. PENDAHULUAN

Ideologi sebenarnya bersumber pada suatu sistem filsafat, dan merupakan pelaksanaan sistem filsafat. Atas dasar asas teoritis, maka tidak mungkin suatu bangsa menganut dan melaksanakan sistem ideologi yang tidak bersumber pada filsafat hidup atau filsafat negara mereka sendiri. Mengingat ideologi nasional bersumber dari filsafat hidup dan filsafat negara mereka sendiri, maka wujud nilai-nilai dasarnya cenderung terpadu.

Untuk membuktikan pada teoritis-filosofis itu, dapat diberikan contoh ideologi yang bersumber dari filsafat tertentu yakni komunisme, dan Pancasila. Komunisme bersumber pada filsafat materialisme, melahirkan faham atheisme serta faham perjuangan kelas dan diktator proletariat. Pancasila bersumber dari filsafat bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala dalam 'triprakoro' (istilah Notonagoro) yaitu adat-istiadat, kebudayaan, dan religi. Kemudian dengan pemikiran yang mendalam para 'founding fathers' menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Persoalannya adalah apakah keunggulan dan ketangguhan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain yang ada di dunia ini!

2. METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah berdasarkan penelitian pustaka, maka data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang diolah dengan metode reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'. Komponen-komponen metode reflektif adalah diskripsi, pemahaman, dan analisa.

3. LANDASAN TEORI

3. 1. Pengertian Ideologi.

Ideologi berasal dari bahasa Greek terdiri dari kata 'idea' dan 'logia'. Idea berasal dari kata 'idein' yang berarti melihat atau suatu rencana yang dibentuk/dirumuskan di dalam pemikiran.

Jadi ideologi menurut arti kata adalah pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.

Secara definitif, ideologi banyak ragamnya. Ideologi menurut *The Advance Learner's Dictionnary* adalah suatu sistim dari pada idea-idea atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan untuk teori politik atau ekonomi. Ideologi menurut *The Webster's New Collegiate Dictionary* adalah : 1. cara hidup (tingkah laku) atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari pada seorang individu atau sesuatu kelas; 2. Pola pikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan (Sukarna, 1981).

Soejono Soemargono (1986) dalam Slamet Sutrisno (1986) secara umum mengartikan ideologi adalah sekumpulan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, gagasan-gagasan yang menyangkut serta mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan itu secara garis besar ada lima hal yaitu bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan/keamanan), sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.

Namun berbagai hal variasi definisi ideologi itu, yang jelas ideologi adalah hasil dari suatu kegiatan pemikiran. Di dalam kegiatan pemikiran itu selalu menggunakan ratio. Immanuel Kant (1724-1804) seorang filosof Jerman mengemukakan bahwa *ratio* manusia itu di dalam kegiatan pemikirannya terbagi dua yaitu : *Reinen Vernunft* atau *pure reason* atau pikiran murni, dan *practische Vernunft* atau *practical reason* atau pikiran praktis.

Pure reason dalam kegiatannya bersifat metaphysis yaitu keluar jagat raya sehingga sampai kepada *Lex Devina* yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia. Sedangkan *practical reason* dalam kegiatannya bertalian dengan *experience* atau pengalaman di mana

pengalaman itu tidak terlepas dari panca indera manusia.

Dengan menggunakan teori Immanuel Kant itu maka dalam ideologi sebagai hasil pemikiran manusia dalam bidang kehidupannya, tidak akan dapat lepas terhadap kepercayaan adanya yang Maha Ghaib, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan terlepas dari pengalaman-pengalaman yang telah dialami manusia pada masa silam dan masa sekarang.

Sebenarnya sesuatu ideologi itu walaupun berasal dari pada hasil pemikiran seseorang atau lebih, pada kenyataannya tidak terlepas dari pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat, bahkan pemikir itu tadi tidak akan dapat hidup dalam masyarakat. Jadi sesuatu pemikiran itu menunjukkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh hasil pemikiran itu sendiri. Jadi tidak benar seperti dikemukakan oleh sesuatu ideologi (Marxisme-Leninisme) yang menyatakan bahwa pemikiran manusia itu hanya ditentukan oleh keadaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sesuatu kenyataan dimana ideologi Marxisme-Leninisme berasal dari pengaruh masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi bahkan mengubah masyarakat itu sendiri. Yang benar adalah pengaruh mempengaruhi antara masyarakat dengan pikiran dan antara pikiran atau idea-idea dengan masyarakat. (Sukarna, 1981)

3.2. Unsur-unsur Ideologi.

Terlepas dari berbagai ragam definisi ideologi, menurut Koento Wibisono (1989) apabila diteliti dengan cermat ada kesamaan unsur ideologi yaitu : keyakinan, mitos dan loyalitas. Keyakinan, dalam arti bahwa dalam setiap ideologi selalu memuat gagasan-gagasan vital, konsep-konsep dasariah yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku atau perbuatan manusia sebagai subyek pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Mitos, dalam arti bahwa setiap

ideologi selalu memitoskan sesuatu ajaran, dan secara optimistik-deterministik mengajarkan, bagaimana suatu ideologi pasti akan dapat dicapai. Loyalitas, dalam arti bahwa dalam setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal kepada para pendukungnya.

Karena itulah agar suatu ideologi mampu menarik keterlibatan optimal para pendukungnya, yang berarti bahwa ideologi tersebut mendapatkan ‘derajat penerimaan optimal’ dari para pendukungnya, maka dalam ideologi tersebut juga harus terkandung unsur-unsur : rasionalitas (*logos*), penghayatannya (*pathos*), dan susilanya (*ethos*) sedemikian rupa dengan unsur-unsur tersebut, suatu konsep ideologi akan dapat diharapkan mengejewantah dalam perilaku konkrit. (Koento Wibisono, 1989)

3.3. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

3.3.1. Arti Ideologi Terbuka.

Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh Negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan Negara modern bahwa Negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan, “... Terutama bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan

aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya”.

Selanjutnya dinyatakan, “... Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan”. (Syahrial Syarbaini, 2003; 57)

Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, yang akan bersifat tidak wajar dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok kecil manusia (yang mengimpor ideologi tersebut). Dengan demikian, ideologi tersebut disebut bersifat tertutup.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak nalar. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan. (Padmo Wahyono, 1991).

3.3.2. Urgensi Keterbukaan Ideologi.

Keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri Negara kita dalam tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual

dalam dunia modern yang berubah dengan cepat.

Dengan menegaskan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, di satu pihak kita diharuskan mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, di lain pihak didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman.

Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka (Kaelan, 2004) adalah sebagai berikut :

1. **Nilai Dasar**, yaitu hakikat sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif sehingga dalam Negara memiliki kedudukan sebagai “*Staatsfundamental norm*” atau pokok kaidah Negara yang fundamental. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran Negara. Adapun nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang didalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggaraan Negara, hubungan antara lembaga penyelenggara Negara beserta tugas dan wewenangnya.
2. **Nilai Instrumental**, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai

instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya Garis-garis Besar Haluan Negara yang lima tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).

3. **Nilai Praksis** yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka dikenal ada tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

3.3.3 Batas-batas Keterbukaan Ideologi Pancasila.

Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar (BP-7 Pusat, 1993), yaitu sebagai berikut :

1. Stabilitas nasional yang dinamis.
2. Larangan terhadap ideology Marxisme, Leninisme, Komunisme.
3. Mencegah berkembangnya paham Liberal.

4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

3.4. Sejauhmana Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia?

Persoalan yang muncul sejauh mana Pancasila telah menjadi dasar negara dan juga menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia? Jawaban dari Pandji Setijo (2006: 14), mengatakan:

1. Ideologi Pancasila telah sesuai serta berakar pada nilai-nilai budaya luhur bangsa sendiri, digali dari kehidupan rakyat yang telah berabad-abad lamanya dari bumi Indonesia semenjak zaman Nusantara;
2. Pancasila juga telah terbukti dapat mempersatukan seluruh kebhinekaan suku, kelompok, agama, bahasa dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjadi satu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bentuk *bhinneka tunggal ika*,
3. Dalam kondisi krisis multidimensi dewasa ini yang sedang melanda bangsa dan negara Indonesia, pelaksanaan ideologi Pancasila telah membantu dalam mengatasi segenap krisis melalui berbagai solusi yang bermanfaat baik,
4. Dengan melaksanakan ideologi Pancasila, derajat dan martabat bangsa Indonesia telah terangkat di tengah kehidupan bangsa dunia, juga untuk kehidupan masyarakat bangsa sendiri.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Paham Ideologi Besar Lainnya Di Dunia.

Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan

sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian dapat juga terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat Negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan Negara. Oleh karena itu ideologi Pancasila, ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam usaha untuk memahami dasar Negara Indonesia yakni Pancasila, akan lebih jelas jika memahami ideologi-ideologi bangsa-bangsa lain. Lebih-lebih jika bangsa lain itu sedikit banyak turut menentukan baik perjalanan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya maupun perjalanan bangsanya sendiri. Ideologi-ideologi bangsa di dunia selain Pancasila adalah :

1. Liberalisme – Kapitalisme
2. Marxisme – Leninisme (Komunisme)
3. Fasisme, Totalitarianisme dan Nasionalsozialisme (NAZI)
4. Sosialisme
5. Sosial Demokrasi

Liberalisme - kapitalisme

Liberalisme, berakar pada kata Latin *liber*, artinya bebas. Seorang yang berjiwa dan berpikiran *liberal* berarti orang yang percaya akan kebebasan sebagai nilai yang utama, di atas nilai-nilai lainnya.

Ada empat ciri pokok dari doktrin liberalisme klasik menurut Ludwig von

Mises (tokoh Liberalisme abad ke-20), yaitu kesejahteraan material, kecenderungan rasionalistik, kebaikan bagi lebih banyak orang, dan kepemilikan hak pribadi atau *property*. (Hendar Putranto, dkk., 2015;71-72)

Masyarakat yang menggunakan prinsip-prinsip liberal seperti 4 ciri tersebut adalah masyarakat kapitalis. Dalam tatanan sosial-ekonomi, kapitalisme didasarkan pada kepemilikan pribadi sarana-sarana produksi. Hak milik pribadi dan kepemilikan atas modal oleh pribadi, yang dilindungi oleh undang-undang, akan menjamin sebuah aturan permainan yang objektif tanpa ada campur tangan kekuasaan (prinsip *non-intervention*) di dalamnya.

Alasannya jika kekuasaan ikut campur tangan, apalagi sampai mengambil alih hak milik, maka aturan permainan akan jadi berat sebelah dan kondisi semacam ini tidak memungkinkan bagi perwujudan kebebasan yang merupakan nilai utama dalam ideologi Liberalisme.

Filsuf politik yang dianggap membesarkan paham liberalisme klasik adalah John Locke (1632-1704), Jean-jacques Rousseau (1712-1778), Jeremy Bentham (1724-1832), dan John Start Mill (1806-1873). Sementara dari sudut pandang ekonomi yang mengemuka yaitu Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-183), Thomas Robert Malthus (1766-1834).

Berpangkal dari dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik, manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Thomas Hobbes disebut '*homo homini lupus*' sehingga manusia

harus membuat suatu perlindungan bersama. Atas dasar kepentingan bersama, negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara. (Kaelan, 2004;142)

Pokok-pokok ideologi liberal menurut Sukarna (1981) adalah :

- a. Percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta.
- b. Percaya terhadap persamaan dasar semua manusia.
- c. Memperlakukan pemikiran orang lain secara sama.
- d. Pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah.
- e. Pemerintahan berlandaskan hukum.
- f. Mementingkan individu.
- g. Negara adalah alat.
- h. Menolak dogmatisme.

Jadi bisa dikatakan bahwa liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebeb mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang perorang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk mengejar kepentingan masing-masing dengan sebeb-bebasnya.

Marxisme – Leninisme (Komunisme).

Marxisme-Leninisme berasal dari nama Karl Marx (filsuf asal Jerman, ahli ekonomi, seorang komunis dan revolusioner, bersama rekannya Friedrich Engels, 1820-1895, merumuskan “kitab suci” kaum komunis, “*The Communist Manifesto*”, yang diterbitkan pada 1848) dan Vladimir Lenin (1870-1924), seorang tokoh komunis revolusioner, politisi dan pemikir politik kelahiran Rusia. Ideologi Marxisme-Leninisme merupakan ideologi gabungan dari ide-ide kedua tokoh ini, dan sering juga disebut sebagai penafsiran Lenin terhadap ideologi Marxis. Nama

ideologi ini awalnya diusulkan oleh Josef Stalin (1878 – 1953).

Sebagai ideologi, komunisme memang “baru” mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917, namun kiprah dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang, berkat daya tarik ajaran ideologisnya untuk membebaskan manusia (kelas *proletar*) dari belenggu penindasan kelas *borjuis*, dan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, di mana cita-cita keadilan dan kesamaan meraja.

Pada 25 Desember 1989, President USSR, Mikhail Gorbachev mundur dari jabatannya dan mengumumkan bahwa pemerintahan komunis sudah punah. *The Supreme Soviet* (parlemen) mengumumkan kebangkrutan dan pembubaran negara komunis Soviet.

Secara ringkas, beberapa ajaran kunci Marxisme-Leninisme adalah :

1. Doktrin partai komunis revolusioner yang memiliki peran kunci dalam masyarakat;
2. Kemungkinan terjadinya revolusi kelas proletar (kelas pekerja) dan terbentuknya sosialisme di negara manapun yang sistem kapitalismenya berkembang lambat;
3. Peran revolusioner dari buruh tani, orang desa dan simpatisan gerakan pembebasan nasional (yang disimbolkan dengan palu dan arit);
4. Penanaman doktrin secara terstruktur, sistematis, dan masif bahwa kapitalisme modern adalah sebetuk penjajahan baru (*imperialisme*);
5. Paham Ateisme yang menolak eksistensi agama dan menyebarkan pemahaman materialis tentang alam. Agama harus dihapuskan dari muka bumi dan sebagai konsekuensinya, ateismelah yang harus dipeluk. (Hendar Putranto, dkk., 2015;73)

Dalam mewujudkan masyarakat komunis, menurut Herqutanto Sosronegoro (1984) digunakan beberapa prinsip pelaksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok yaitu:

- a. Sistem totaliter.
- b. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai.
- c. Sistem ekonomi negara.
- d. Sistem sentralisme demokratis.

Fasism-Totalitarianisme-Nasionalisme (Nazi)

Kata Fasisme (*fascism*) berasal dari kata Italia *fascio* (bentuk jamaknya: *fasci*), yang berarti ikatan (*bundle*). Ditampilkan dalam ikatan kelompok (entah politis, ideologis, berdasarkan kelas, dsb.) atau ikatan kolektif seperti bangsa. Selain itu bisa juga berasal dari kata *fasces* (rumpun atau akar yang dililitkan mengelilingi sebilah kapak), yang merupakan simbol Kekaisaran Romawi kuno untuk otoritas hukum (*magistrates*). Simbol “rumpun atau akar yang melilit” (*fasces*) menunjukkan makna terbentuknya kekuatan lewat persatuan: kalau hanya sebatang ranting kecil akan mudah dipatahkan, sementara kalau sebundel akan sulit untuk dipatahkan.

Kamus Merriem-Webster mendefinisikan fasisme sebagai sebuah filsafat politik, gerakan politik atau rezim (*Fascisti*) yang mengagungkan bangsa dan ras di atas individu, yang berjuang untuk mewujudkan pemerintahan otokrasi, dan tersentral yang dikepalai seorang diktator, dengan mekanisme pengaturan sosial dan ekonomi yang keras terkontrol, dan memakai cara-cara kekerasan untuk menekan lawan politiknya (oposisi). (Hendar Putranto, dkk., 2015; 75)

Menurut Prof. Dr. William Eberstein (dalam Sukarna, 1981) Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai, yang berwatak atau bercorak *nasionalist*, *racialist*, *militarist* dan *imperialist*.

Sosialisme.

Sosialisme bertumpu pada ide keadilan dan solidaritas sosial. Paham “solidaritas sosial” sebenarnya sudah bisa ditelusuri akar historisnya sejak Abad

Pertengahan, lewat paham religius Kristiani yang mengatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup, orang harus terbebas dari segala jenis keterikatan atau kelekatan duniawi, terutama keterikatan terhadap hak milik. Gagasan kunci pelepasan diri dari kelekatan duniawi ini berkeyakinan bahwa hak milik pribadi sebagai sarana yang membuat manusia menjadi egois dan, pada gilirannya, menghancurkan keselarasan alami atau harmoni antara alam dan manusia.

Sosial-demokrasi merupakan ideologi politik yang mengkampanyekan transisi masyarakat secara damai dan evolusioner, dari kapitalisme menuju sosialisme, dengan menggunakan proses-proses politik yang sudah ada dan dianggap mapan.

Meminjam cukup banyak ide dan mimpi dari sosialisme abad ke-19, digabungkan dengan pokok-pokok ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, ideologi sosial-demokrasi berbagi akar-akar ideologis yang sama dengan ideologi komunisme, namun tidak mengadopsi semangat militan, penggunaan kekerasan, maupun pandangan totaliternya. Ideologi ini awalnya dikenal dengan nama *revisionisme*, karena di dalamnya berisikan ajaran Marxis yang sudah mengalami modifikasi, khususnya dalam hal tidak menggunakan jalan revolusi untuk membentuk masyarakat yang sosialis.

4.2. Keunggulan Ideologi Pancasila

Berikut merupakan artikulasi ringkas keunggulan Pancasila jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi besar dunia lainnya.

1. Sila Pertama Pancasila lebih unggul dibandingkan paham Atheisme yang dianut Komunisme, yang berbasiskan ajaran *materialisme dialektis* dan *materialisme historis* versi Marxisme. Berbeda dari Marxisme dan Leninisme (Komunisme) yang menjangkarkan ideologinya pada paham sejarah dan alam yang berwujud materi dan kembali

- (lagi) pada materi, dalam suatu gerak materi yang menempuh siklus abadi tanpa akhir, Ideologi Pancasila sila pertama menjangkarkan sekaligus menjiwai sila-sila yang lain (Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) dalam Realitas yang Pertama dan *Ultim*, sekaligus memberikan orientasi yang lebih luhur dan transenden dalam diri manusia penghayatnya.
2. Sila Kedua Pancasila, berupa prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mau menunjukkan jalan tengah konsep tentang “Manusia” yang lebih seimbang dan bijaksana sebagai tandingan dari kontestasi konseptual antara paham Liberalisme-Kapitalisme, yang melihat gambaran manusia sebagai “subjek pelaku bebas yang dapat mendeterminasi dirinya sendiri” dan *homo oeconomicus* murni, dengan paham Sosialisme dan Komunisme, yang melihat gambaran manusia sebagai “yang dibentuk oleh totalitas relasi-relasi sosialnya,” (pandangan Feuerbach dan Marx awal) juga sebagai *zoon politikón* (Aristoteles) atau *homo socius* (manusia sebagai makhluk politik dan makhluk sosial). Dengan demikian, konsep manusia Pancasila lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang dalam memandang, meneliti, dan memperlakukan manusia, tidak berat sebelah seperti pada Liberalisme-Kapitalisme, maupun pada Marxisme-Sosialisme.
 3. Konsep Persatuan Indonesia sebagai Sila Ketiga Pancasila lebih unggul daripada konsep persatuan ras (NAZI) dan persatuan bangsa yang chauvinis (*Fasis*). Persatuan ras dan bangsa yang chauvinis merupakan pemahaman persatuan yang sempit dan singularis, bahkan eksklusif. Persatuan jenis ini mengandung unsur peninggian diri sendiri (*superioritas ras Arya*) dan perendahan yang-lain yang berbeda (*inferioritas*), yang lalu dilegalkan (*Nuremberg Laws*) dan dijustifikasi secara ilmiah (ilmu *eugenics*). Persatuan model fasis bertumpu pada keseragaman dan penyeragaman yang berimplikasi pada penyangkalan bahkan peniadaan yang lain dan berbeda. Persatuan model *Volksgemeinschaft* yang digelorakan NAZI secara implisit mengandung kehendak untuk berkuasa dan meluaskan kekuasaan tersebut (*ekspansi*) sekaligus kehendak untuk menjaga kemurnian darah dan tanah air dari unsur-unsur yang dianggap “asing, lain, dan berbeda” (seperti orang Yahudi, kaum *gipsy*, kaum *homoseksual*, dst). Prinsip Persatuan Indonesia versi Pancasila tidak seperti ini. Prinsip Persatuan Indonesia didasarkan pada penghormatan atas perbedaan dan keragaman, bukan hanya secara prinsipil, namun juga secara riil-konkret.
 4. Sila keempat pancasila lebih unggul dibandingkan paham kerakyatan yang diusung baik oleh sosialisme maupun fasisme. Dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Sukarno mengatakan bahwa ‘Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara’ semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu’. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan’ Dengan demikian jelas bahwa prinsip kerakyatan yang diwujudkan dalam bentuk badan permusyawaratan/perwakilan, yang dipimpin oleh “hikmat kebijaksanaan” (dalam bentuk tuntunan moral lewat agama dan tuntunan akal budi lewat filsafat) merupakan amanah para bapak pendiri Negara Indonesia yang membedakannya dengan, dan membuatnya lebih unggul dari, prinsip kerakyatan “solidaritas sosial” yang

bertumpukan pada perjuangan dan antagonisme kelas yang dicita-citakan Sosialisme dan Marxisme.

5. Konsep sila kelima Pancasila yang berimplikasi pada konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang diusung Liberalisme-Kapitalisme dan bentuk barunya, yaitu paham Neo-Liberalisme, maupun ekonomi yang dikontrol sepenuhnya oleh negara seperti tampak dalam paham komunisme maupun fasisme. Menurut Sri Edi Swasono, Sistem Ekonomi Indonesia dapat difokuskan pada wawasan yang dikaitkan dengan sila Pancasila yaitu berorientasi pada lima sila Pancasila dengan tekanan pada sila “Keadilan sosial” yang berarti kegiatan ekonomi menggunakan asas persamaan demi kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perseorangan. Hal ini paling jelas terwujud dalam konsep Koperasi. (Hendar Putranto, dkk., 2015, 80-84)

4.3. Ketangguhan Ideologi Pancasila

Di mata pengamat dan akademisi dari Barat yang berminat mengkaji dan peduli tentang ideologi Pancasila, Pancasila merupakan ideologi yang masuk akal dan dijalankan di Indonesia jika Indonesia tetap ingin mempertahankan persatuan dan keragamannya secara bersamaan. Berbagai ancaman yang dihadapi baik datang dari dalam maupun dari luar yang terkait ideologi seperti DI/TII, NII, PKI, samai sekarang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya.

Ketangguhan Pancasila berkontestasi dengan ideologi-ideologi besar maupun alternatif tersebut, bukan hanya karena faktor internal ideologi itu sendiri, yaitu kebulatan dan keutuhannya yang mengagumkan, namun juga karena dukungan faktor eksternal yaitu barisan penjaga ideologi Pancasila, baik yang formal seperti Presiden dan jajaran

kabinetnya, para penatar Pancasila lulusan Lemhannas RI, para guru dan dosen pengajar dan pendidik Pancasila, maupun informal, seperti para tokoh agama, suku dan adat, serta komunitas warga di tingkat akar rumput, yang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam memperjuangkan penegakan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sehari-hari.

Supaya tetap tangguh ideologi Pancasila maka yang perlu dilakukan antara lain :

1. Penguatan dan radikalisasi ideologi Pancasila tidak hanya ditujukan kepada para kader pemimpin di bidang pemerintahan (seperti lewat aneka kursus “wajib” yang diadakan oleh Lemhannas), namun juga bagi para pemimpin dan pengurus ormas, partai politik, organisasi Serikat Buruh, para pimpinan universitas, sekolah baik negeri maupun swasta, pondok pesantren dan pusat-pusat pembelajaran agama serta aliran kepercayaan.
2. Ideologi Pancasila sebagai benteng identitas nasional perlu lebih digalakkan lagi di wilayah perbatasan atau titik-titik terluar batas wilayah NKRI Ideologi Pancasila sebagai ikhtiar pembangunan karakter bangsa perlu kembali dimasukkan sebagai kurikulum wajib di semua tingkat pendidikan formal di seluruh Indonesia, hanya saja dihindari cara-cara penyampaian yang indoktrinatif dan semi-militeristik seperti pola P4 di masa Orde Baru. Para guru, dosen, dan penatar Pancasila memegang peranan penting dan tak tergantikan untuk secara kreatif dan inspiratif memperkaya metode pengajaran, sosialisasi, dan internalisasi ideologi Pancasila bagi siswa didiknya.

5. KESIMPULAN

Ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh dan yang mengkait menjadi suatu sistem pemikiran yang logis, adalah

bersumber pada filsafat. Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah hasil karya bangsa Indonesia sendiri sejajar dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia, bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BP-7 Pusat, 1993, *Bahan Penataran P-4, Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta.
- Hendar Putranto, dkk., 2015, *Pendidikan Pancasila; Ikhtiar Membangun Karakter Bangsa*, Penerbit Universitas Multimedia Nusantara Press, Tangerang-Banten.
- Herqutanto Sosronegoro, dkk., 1984, *Beberapa Ideologi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Penerbit paradigma Yogyakarta.
- Koento Wibisono, 1989, *Peran Kelompok Ilmiah Dalam Ikut Mengembangkan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, Makalah dalam Forum Pertemuan Para Anggota Komisariat Fak. Filsafat Keluarga Alumni UGM, Jakarta.
- Oetojo Oesman dan Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP7 Pusat, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1991, "Demokrasi Politik Indonesia" dalam Rusli Karim dan Fauzi Rizal, *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*, Tiara Wacana, Jakarta.
- Pandji Setijo, 2006, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Slamet Sutrisno (Penyunting), 1986, *Pancasila Sebagai Metode*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono Soemargonno, 1986, 'Pancasila Sebagai Suatu Ideologi' dalam Slamet Sutrisno (Penyunting), *Pancasila Sebagai Metode*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukarna, 1981, *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Syahrial Syarbaini, 2003, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.